

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

VISI SUMSEL 2025-2029

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

- Sumsel sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil
- Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik

MISI

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan rumah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

II. Belanja, Program APBD dan Program APBN

a. Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 27.106.682.849 yang terdiri atas:

Belanja Operasi	: 26.926.682.849
Belanja Pegawai	: 20.788.081.732
Belanja Barang dan Jasa	: 6.138.601.117
Belanja Modal	: 180.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: 180.000.000

Pada Tahun 2026 Dinas Kelautan dan perikanan Memiliki 6 Program dan 20 Kegiatan serta 41 Sub Kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2) Program dan Anggaran APBD

Total pagu Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 27,106,682,849** dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
1	2		3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		24,133,182,849.00
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203,228,024.00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81,228,024.00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	40,000,000.00
	4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	55,000,000.00
	5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	12,000,000.00
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,900,081,732.00
	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,788,081,732.00
	7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,000,000.00
	8	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12,000,000.00
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	67,500,000.00
	9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	67,500,000.00
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145,959,185.00

	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145,959,185.00
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	803,000,000.00
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,000,000.00
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127,000,000.00
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00
	14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,000,000.00
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486,000,000.00
	vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,599,145,266.00
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	576,145,266.00
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,023,000,000.00
	vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414,268,642.00
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234,268,642.00
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180,000,000.00
II	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL		153,000,000.00
	i	Kegiatan Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	137,500,000.00

	20	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	10,000,000.00
	21	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	115,000,000.00
	22	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	12,500,000.00
	ii	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15,500,000.00
	23	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	15,500,000.00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		745,000,000.00
	i	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	220,000,000.00
	24	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	220,000,000.00
	ii	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	461,000,000.00
	25	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	16,000,000.00
	26	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	445,000,000.00
	iii	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	23,000,000.00

	27	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal Ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	23,000,000.00
	iv	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	41,000,000.00
	28	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	41,000,000.00
IV		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,295,000,000.00
	i	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	55,000,000.00
	29	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan	45,000,000.00
	30	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	10,000,000.00
	ii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	80,000,000.00
	31	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	55,000,000.00
	32	Monitoring KesehatanIkan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	25,000,000.00
	iii	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1,160,000,000.00
	33	Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota	25,000,000.00

	34	Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota	1,135,000,000.00
V		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	130,000,000.00
	i	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	105,000,000.00
	35	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan atau Usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi	25,000,000.00
	36	Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	80,000,000.00
	ii	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air lainnya yang dapat di usahakan lintas Kabuoaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25,000,000.00
	37	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/ atau Usaha pengolahan hasil Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	25,000,000.00
VI		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	650,500,000.00
	i	Kegiatan Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	300,000,000.00

	38	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	160,000,000.00
	39	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	140,000,000.00
	ii	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam (satu) daerah Provinsi	350,500,000.00
	40	Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ distribusi ikan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	324,000,000.00
	41	Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	26,500,000.00
Jumlah : 41 Kegiatan			27,106,682,849

3) Program dan Kegiatan APBN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan saat ini belum ada DIPA nya dan masih belum bisa diakses.

4. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

a) Kota Palembang

Terdapat 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- 4) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- 5) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- 6) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 7) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 8) Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- 9) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 10) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 12) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 13) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 14) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 20) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 21) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 22) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 23) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 24) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota

- 25) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 26) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 27) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- 28) Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ distribusi ikan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 29) Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 30) Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas
- 31) Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan / atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi
- 32) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan / atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
- 33) Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

b) Kabupaten Ogan Komering Ilir

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kota Ogan Komering Ilir, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- 2) Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3) Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
- 4) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 5) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (LAUT)
- 6) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 7) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 8) Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal Ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
- 9) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan

- 10) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 11) Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- 12) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 13) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 14) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 15) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- 16) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi

c) Ogan Komering Ulu

Sedangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan diantaranya:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

d) Ogan Komering Ulu Timur

Di Kabupaten OKU Timur kegiatan kewilayahan ada 2 (Dua) antara lain:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

e) Kabupaten Pali

Di Kabupaten Pali ada 2 (Dua) kegiatan kewilayahan yakni:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

f) Kabupaten Muara Enim

Kegiatan kewilayahan di Kabupaten Muara Emin diantaranya:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

g) Kabupaten Lahat

Kegiatan kewilayahan di Kabupaten Lahat ada 3 (tiga), kegiatan tersebut adalah:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

h) Kota Pagar Alam

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

i) Kota Lubuk Linggau

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- 9) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten / kota

j) Kabupaten Musi Rawas

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

k) Kabupaten Musi Rawas Utara

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

- l) Kabupaten Musi Banyuasin
 - 1) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (LAUT)
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
 - 3) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
 - 4) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
 - 5) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
 - 6) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - 7) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - 8) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
 - 9) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

- m) Kabupaten Banyuasin
 - 1) Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 2) Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
 - 3) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 4) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (LAUT)
 - 5) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
 - 6) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
 - 7) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
 - 8) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
 - 9) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
 - 10) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - 11) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - 12) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk

yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing

- 13) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- 14) Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal Ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
- 15) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan / atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi
- 16) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan / atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
- 17) Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

n) Kabupaten Ogan Ilir

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- 9) Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas
- 10) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan / atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

- 11) Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

o) Kabupaten Empat Lawang

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

p) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

q) Kota Prabumulih

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- 2) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)
- 3) Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan
- 4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 6) Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 7) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing
- 8) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Penyampaian Laporan hasil Pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2026 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan II ini pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah:

4) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7
Total Belanja	27.106.682.849	11.347.719.046	46.36	41.86	63.86	62.57
Belanja Pegawai	20.788.081.732	9.911.486.436	65.00	47.67	85.00	85.00
Belanja Barang dan Jasa	6.138.601.117	1.436.232.610	65.00	23.39	85.00	75.00
Belanja Modal	180.000.000	0	25.00	0	50.00	35.00

b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026

✓ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi TW II	Capaian
1	NTN	Ton	117,87	111,91	94,94 %
2	NTPi	Ton	94,47	89,82	95,07 %
3	Nilai Sakip Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	81	*0	0 % (Angka Sementara)

*)SAKIP adalah nilai keterhitungan/akuntabilitas keseluruhan indikator mulai dari perencanaan tahun n-1 sampai selesai pelaksanaan pada akhir tahun dan dilakukan oleh Instansi yang berwenang pada tahun n+1, sehingga belum ada perhitungan per triwulan nya

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2026

b. Tindak Lanjut yang diperlukan

IV. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Dan APBN Triwulan II Tahun Anggaran 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi acuan dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan di sumatera selatan khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi program/kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sehingga akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.



**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**H. ARIES IRWAN WAHYU, S.STPi., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV C**

NIP. 19681120 198903 1 006